

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Jakarta: BP Cipta Jaya, 2006.
- Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010),
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006,
- Anton M. Moeliono dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Bantekas, Ilias, Susan Nash. Hukum Pidana Internasional 2/E , Cavendish: Routledge, 2003.
- Devi Rahayu, Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus, Yogyakarta: New Elmatara, 2011
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003,
- E. Fernando M. Manullang, Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum, Jakarta: Kencana, 2017.
- Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Hans Kelsen. Teori Umum tentang Hukum dan Negara, terj. Raisul Muttaqien, Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006
- Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective, Nusa Media, Bandung, 2009,
- Leden Marpaung, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, 2005,
- Mansyur, Didik M.Arief dan ElisatrisGultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Muladi, *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung , 2005.
- Nanda Agung Dewantoro, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987)

- Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 32
- Rasjidi Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, 2010.
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000,
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1999.
- Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, edisi kedua, cetakan ke-1. Bandung: Alumni, 2006.
- Siswanto Sunarso. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta Rajawali Pers, 2016.
- Waluyo Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, 2016, Jakarta.
- Wahyono, Agung, dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 1993.

B. Jurnal

- Bothy Dewandaru, Afif Nur Rahmadi, and Evi Husniati Sya'idah, "Pemanfaatan Remitansi Pekerja Migran Indonesia Serta Peran Usaha Pekerja Migran Indonesia Purna Untuk Pembangunan Desa Asal," *Warmadewa Economic Development Journal* 2, no. 2 (2019): <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/wedj.2.2.1297.44-50>. Bradley, Keith R, "Apuleius dan perdagangan budak di sub-Sahara". *Apuleius dan Roma Antonine: Esai Sejarah*.
- David Mattingly. "Suku Garamantes dan Asal Usul Perdagangan Sahara". *Perdagangan di Sahara Kuno dan sekitarnya*. Cambridge University Press.
- Haryanto Budi R. *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Oleh Kejaksaan*. MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.
- M. Chaerul Risal, (2013). Kompensasi dan Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Hasanuddin.
- Kristine Sondang. Pelaksanaan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang

Nomor: 1633/PID.B/2009/PN.TK atas nama Fitriyani binti Muradi), Tesis, FH Universitas Indonesia, 2012.

Ramadhani, Reski Awalia. *Analisis Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Studi Putusan No. 1732/Pid. Sus/2017/PN. Mks.* Diss. Universitas Muslim Indonesia, 2022.

Roesal iNugroho, B., M, *Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)* Jurnal bina mulai hukum.

Supriyadi Widodo Eddyono, et.al, Masukkan terhadap perubahan Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, hlm 14

Takariawan, A. Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. 2018. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(2), 237–255.

Theo van Boven, Tentang Mereka yang Menjadi Korban: Kajian Terhadap Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi (Rapporteur; Commission on Human Rights, Economic and Social Council, United Nations, 2 Juli 1993

Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya dalam Penegakaan Hukum Di Indonesia), Widya Padjajaran, Bandung, 2004.

C. Undang-undang dan putusan pengadilan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang – undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 tentang salinan tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah.

Putusan nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN Mks.

D. Webiste

<https://humas.polri.go.id/2023/10/10/satgas-tpo-polri-selamatkan-2-778-korban-perdagangan-orang/> (diakses pada tanggal 20 April 2024).

<https://polkam.go.id/angka-kasus-terus-meningkat-kemenko-polhukam-ajak-perangi-tpo/> (diakses pada tanggal 20 April 2024).

<https://polkam.go.id/angka-kasus-terus-meningkat-kemenko-polhukam-ajak-perangi-tpo/> (diakses pada tanggal 20 April 2024).

<http://tesishukum.com/pengertian-perindungan-hukum/> di akses pada tanggal 12 Oktober 2024

<https://www.ilo.org/topics/forced-labour-modern-slavery-and-trafficking-persons/data-and-research-forced-labour> (di akses tanggal 6 Oktober 2024

<https://polkam.go.id/angka-kasus-terus-meningkat-kemenko-polhukam-ajak-perangi-tpo/> (diakses pada tanggal 20 April 2024).

<https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 16 September 2024, Pukul 20:12 WITA.

<https://bp2mi.go.id/berita-detail/peranan-undang-undang-baru-terkait-pelindungan-pekerja-migran-indonesia>,diakses pada 22 Oktober 2024

<https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3725017/sejarah-awal-tenaga-kerja-indonesia>, diakses pada 22 Oktober 2024

<https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>, diakses pada 23 Februari 2021

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595

Keterangan Pers keterangan pers Nomor: 15/HM.00/III/2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) tanggal 25 Maret 2024.

Nadia Wulandari, *Hak Restitusi korban tindak pidana perdagangan orang (analisis putusan nomor 2301/pid.sus/2013/PN/TGN). 2021. UIN Hidayatullah*